

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis data dari pembahasan sebelumnya, yang termuat pada bab-bab dalam tesis ini. Penelitian ini berkesimpulan bahwa manajemen komunikasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam konteks informasi kegiatan mutasi jabatan struktural belum dilakukan secara tepat. Hal tersebut disebabkan oleh :

1. Pendefinisian masalah *public relations* dalam kegiatan mutasi jabatan struktural oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan masih berdasarkan riset informal. Analisisnya tidak dilakukan secara komprehensif dan hanya fokus kepada kebutuhan internal Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan saja. Tidak ada kegiatan riset yang dilakukan, dan pengolahan dokumen serta data hanya digunakan untuk kelancaran kegiatan internal Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecendrungan model perencanaan yang dilakukan adalah mode evolusioner, yaitu strategi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam kegiatan mutasi jabatan struktural berkembang dari waktu ke waktu, hal ini mempresentasikan pola keputusan yang merespon situasi atau kondisi dalam

lingkungan. Secara administratif Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ada membuat rencana berjangka, baik itu dalam bentuk tahunan maupun dalam bentuk lima tahunan (seperti rencana strategis/renstra), namun hal itu dilakukan dengan tetap menyediakan ruang terhadap hal-hal yang dapat dilakukannya penyesuaian ketika menghadapi dinamika yang terjadi.

3. Tindakan berkomunikasi, aksi serta koordinasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam konteks mutasi jabatan struktural telah dilakukan dengan baik dan terarah, namun masih sangat lemah dalam penerapan asas-asas *good governance* terutama mengenai asas keterbukaan informasi kepada publik.
4. Evaluasi atas kegiatan komunikasi secara metodologis baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif terhadap kegiatan mutasi jabatan struktural belum dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Hal ini juga memberikan gambaran bahwa tahapan siklus manajemen komunikasi pada kegiatan mutasi jabatan struktural tidak berlangsung secara sempurna. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa, terkait kegiatan mutasi jabatan struktural yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, belum melakukan tindakan evaluasi komunikasi yang memadai, baik itu tindakan evaluasi komunikasi dari segi evaluasi persiapan, evaluasi implementasi maupun evaluasi dampak.

5.2. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran terkait manajemen komunikasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam konteks informasi kegiatan mutasi jabatan struktural sebagai berikut:

1. Pada setiap tahap manajemen komunikasi, terutama informasi terkait perencanaan dan pemograman serta mengambil tindakan dan berkomunikasi sebaiknya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara online.
2. Dalam rangka suksesi Grand Design Reformasi Birokrasi, dimana dalam rencana aksi 9 (sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi salah satu diantaranya adalah Program Sistem Promosi PNS secara terbuka, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu mempertimbangkan untuk dilakukannya pengisian jabatan struktural yang lowong di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara terbuka atau lelang jabatan.
3. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku pembantu Kepala Daerah dalam mengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sudah seyogyanya menjadi motor penggerak dalam menyusun sebuah pedoman atau aturan pola Karir Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana pedoman atau aturan pola Karir Aparatur Sipil Negara tersebut akan menjadi pendorong terciptanya

Aparatur Sipil Negara yang profesional, kreatif, bertanggungjawab dan memiliki kinerja tinggi yang didukung oleh sistem pembinaan Karir yang jelas, kompetitif, selektif dan transparan.

4. Dalam rangka mempertajam analisa situasi kebijakan publik, terkait penyediaan pelayanan informasi kepada publik, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu menggunakan pendekatan riset formal seperti survey, analisis konten, polling, dan sebagainya. Pendekatan ini akan efektif untuk mendapatkan informasi obyektif dan mampu mengurangi ketidakpastian dalam menyusun perencanaan komunikasi pemerintah.
5. Perlu adanya diskusi ilmiah mengenai desain komunikasi pemerintah daerah, hal ini mengingat aliran informasi antar instansi pemerintah daerah maupun dengan publiknya masih belum maksimal.

